

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI BALI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Ni Wayan Diah Kemaladewi¹ Ni Nyoman Ayu Diantini²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
E-mail: diahkemala.contact@gmail.com

ABSTRAK

Ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan ketergantungan Provinsi Bali pada sektor pariwisata menunjukkan pentingnya optimalisasi kebijakan fiskal daerah dalam mendorong pertumbuhan yang lebih merata dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2015–2024 dengan 90 observasi, menggunakan metode Partial Least Squares. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta publikasi resmi instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, DAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal, sementara DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pada hubungan tidak langsung, belanja modal tidak mampu memediasi pengaruh DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa dana transfer daerah belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal terbukti berperan dalam meningkatkan aktivitas ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kata kunci: belanja modal; dana alokasi khusus; dana alokasi umum; pertumbuhan ekonomi

ABSTRACT

This study examines regional fiscal policy and economic growth disparities in Bali Province, which is highly dependent on tourism, by analyzing the roles of DAU and DAK in influencing growth through capital expenditure. Using 2015–2024 regency and city data with 90 observations and Partial Least Squares analysis, the study evaluates both direct and indirect effects. DAU has no effect on economic growth, while DAK negatively affects economic growth, and capital expenditure positively influences economic growth. Additionally, DAU negatively affects capital expenditure, while DAK shows no effect on capital expenditure. Capital expenditure does not mediate the relationship between DAU, DAK, and economic growth. Overall, the findings suggest that intergovernmental transfers have not effectively driven growth, while capital expenditure remains important for regional economic activity and sustainability. This implies the need for improved allocation efficiency and policy coordination to ensure that fiscal transfers translate into productive spending and stronger inclusive growth outcomes across regencies and cities in Bali Province.

Keywords: capital expenditure; economic growth; general allocation fund; special allocation fund

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah karena mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Kurniawati & Muzdalifah, 2022; Sukirno, 2016). Pertumbuhan ekonomi mencerminkan sejauh mana aktivitas perekonomian mampu menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat dalam periode tertentu (Kusumawati & Wiksuana, 2018). Pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak selalu berjalan stabil dan merata karena dipengaruhi oleh struktur ekonomi, potensi wilayah, serta kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah daerah. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengelola sumber daya ekonominya.

Pemerintah perlu segera melakukan langkah stabilisasi ketika pertumbuhan ekonomi berada di bawah target yang telah ditetapkan melalui peningkatan belanja atau kebijakan fiskal lainnya seperti pemberian insentif pajak, subsidi, serta percepatan realisasi belanja pemerintah guna mendorong permintaan agregat dan aktivitas ekonomi. Sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara alami tanpa campur tangan pemerintah telah melebihi target, pemerintah tidak memiliki alasan untuk menambah belanja karena perekonomian sudah berkembang dengan baik. Kebijakan pemerintah dalam mengatur besaran belanja negara bertujuan untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan sesuai dengan sasaran yang direncanakan.

Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama pemerintah dalam konteks makroekonomi untuk memengaruhi aktivitas ekonomi melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara. Peningkatan belanja pemerintah dapat mendorong permintaan agregat yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi. Pada kerangka desentralisasi fiskal, peran tersebut dilaksanakan melalui transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah yang bertujuan meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendorong aktivitas ekonomi regional. Peningkatan kapasitas fiskal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memperbesar belanja publik, khususnya belanja modal dan pembangunan infrastruktur, yang selanjutnya mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Provinsi Bali merupakan salah satu daerah dengan karakteristik ekonomi yang unik karena sangat bergantung pada sektor pariwisata sebagai sektor utama penggerak perekonomian. Ketergantungan ini menyebabkan perekonomian Bali menjadi lebih rentan terhadap perubahan eksternal, seperti COVID-19, sehingga berdampak pada fluktuasi pertumbuhan ekonomi daerah (Indrawati *et al.*, 2024). Penurunan aktivitas ekonomi tersebut turut berdampak pada menurunnya pendapatan asli daerah, sehingga mengurangi kapasitas fiskal pemerintah daerah. Keterbatasan kapasitas fiskal tersebut berimplikasi pada semakin sempitnya ruang fiskal daerah dalam mengalokasikan belanja, terutama belanja modal yang bersifat produktif.

Berdasarkan data realisasi APBD kabupaten/kota di Bali yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa struktur belanja daerah cenderung didominasi oleh belanja operasi, sehingga alokasi untuk belanja modal menjadi berkurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah

daerah menerima dana transfer dari pusat, keterbatasan ruang fiskal tetap menjadi kendala dalam mendorong belanja pembangunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terdapat perbedaan kapasitas fiskal antar kabupaten/kota di Provinsi Bali yang tercermin dari variasi PAD yang dihasilkan. Perbedaan ini menyebabkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan tidak merata, terutama ketika terjadi ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh menurunkan sumber pendapatan daerah (Yuwono *et al.*, 2024). Salah satu contoh kondisi tersebut adalah pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap penerimaan daerah.

Dampak pandemi relatif lebih besar di Provinsi Bali karena struktur perekonomian daerah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata sebagai kontributor utama PDRB. Penurunan kunjungan wisatawan menunjukkan pentingnya penguatan sektor ekonomi non-pariwisata melalui diversifikasi struktur ekonomi daerah, yang dapat dilakukan melalui peningkatan belanja modal pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, industri pengolahan, dan pengembangan UMKM (Apriyanti & Hatmoko, 2024).

Tabel 1.
PDRB Tahunan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)

Sektor	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,47	21,26	21,33	21,15	21,03	21,57
Pertambangan dan Penggalian	1,42	1,36	1,36	1,42	1,44	1,46
Industri Pengolahan	10,35	9,69	9,7	10,24	10,47	11,00
Pengadaan Listrik dan Gas	0,33	0,28	0,26	0,31	0,35	0,39
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	0,33
Konstruksi	16,30	15,85	15,84	16,43	16,58	16,88
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,29	14,21	14,01	14,8	15,6	16,23
Transportasi dan Pergudangan	11,87	8,06	6,63	8,07	10,11	10,71
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32,97	23,9	21,46	24,44	28,39	31,78
Informasi dan Komunikasi	11,65	12,37	12,71	12,63	12,85	13,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,75	6,45	6,24	6,75	7,65	8,8
Real Estate	7,46	7,5	7,54	7,71	7,75	7,89
Jasa Perusahaan	1,81	1,73	1,68	1,82	1,94	2,08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,95	8,92	8,97	8,63	8,53	9,15
Jasa Pendidikan	8,99	8,91	8,98	8,98	8,97	9,09
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,93	4,04	4,26	4,31	4,41	4,5
Jasa lainnya	2,73	2,55	2,5	2,74	2,96	3,14
Produk Domestik Regional Bruto	162,69	146,49	143,87	150,83	159,44	168,18

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali, pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola yang

berfluktuasi, terutama pada periode pandemi yang menyebabkan penurunan signifikan sebelum kembali mengalami pemulihan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proses pemulihan ekonomi antar kabupaten/kota di Bali tidak berlangsung secara merata. Perbedaan struktur ekonomi daerah, seperti dominasi sektor pariwisata di sebagian wilayah dan sektor pertanian di wilayah lainnya, berkontribusi terhadap variasi kinerja ekonomi daerah. Data PDRB yang mencerminkan kinerja ekonomi daerah dari waktu ke waktu dapat digunakan untuk melihat dinamika pertumbuhan ekonomi secara lebih komprehensif. PDRB menjadi indikator dalam menggambarkan perubahan kondisi ekonomi, termasuk dampak dari faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 serta proses pemulihan ekonomi yang terjadi setelahnya.

Secara umum, struktur PDRB Provinsi Bali didominasi oleh beberapa sektor utama yang memiliki kontribusi relatif besar dibandingkan sektor lainnya. Sektor pariwisata atau yang disebut sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada Tabel 1 terlihat menjadi salah satu sektor dengan kontribusi dominan dalam perekonomian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Provinsi Bali memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sektor pariwisata, sehingga perubahan aktivitas pada sektor tersebut akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan. Data PDRB Provinsi Bali pada Tabel 1 juga menunjukkan bahwa selain pariwisata, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB daerah. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi ekonomi produktif yang dapat diperkuat melalui peningkatan belanja modal pemerintah daerah, seperti pembangunan infrastruktur pendukung produksi, peningkatan kapasitas pengolahan hasil, serta pengembangan UMKM berbasis sumber daya lokal. Pemerintah daerah Bali perlu mengoptimalkan pembangunan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan tepat sasaran untuk mengurangi risiko ketergantungan terhadap sektor pariwisata dan mendorong stabilitas ekonomi jangka panjang (Apriyanti & Hatmoko, 2024).

Kondisi pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi, tetapi juga memengaruhi arah kebijakan fiskal daerah. Pemerintah daerah di Bali melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi, khususnya pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi. Laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa berbagai sumber pendapatan daerah, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pendapatan asli daerah, dialokasikan untuk mendukung kebutuhan tersebut (Pemerintah Provinsi Bali, 2020). Perubahan arah penggunaan anggaran ini menyebabkan sebagian dana yang sebelumnya berpotensi digunakan untuk kegiatan pembangunan menjadi dialihkan pada penanganan pandemi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh konteks ekonomi yang terjadi pada periode tertentu.

Kebijakan fiskal daerah melalui dana transfer pemerintah pusat menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana transfer pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mendukung pembiayaan pembangunan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa

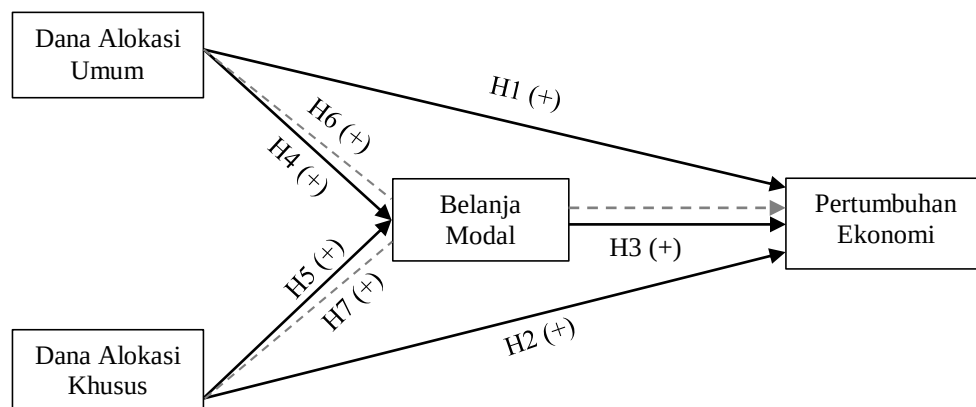
pengaruh dana transfer terhadap pertumbuhan ekonomi belum konsisten dan sangat bergantung pada bagaimana dana tersebut dialokasikan dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah (Hutasuhut *et al.*, 2025; Priambodo & Hidayat, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa dana transfer tidak secara otomatis berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi apabila tidak diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif. Pengelolaan keuangan yang efektif menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja ekonomi. Kemampuan dalam memahami dan mengelola aspek keuangan akan mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang berdampak pada peningkatan hasil ekonomi (Candraningrat *et al.*, 2025). Literasi keuangan dan kemampuan pengelolaan terbukti berperan dalam meningkatkan kinerja melalui peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya (Djuniardi *et al.*, 2026). Studi tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan dan kapabilitas manajerial berperan dalam meningkatkan kinerja organisasi yang dalam hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu entitas dalam mencapai kinerja yang optimal. Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin melalui alokasi dan penggunaan anggaran, khususnya belanja modal, menjadi salah satu mekanisme penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Teori keuangan public (*public finance*) menjelaskan peran pemerintah dalam perekonomian melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelaku aktif melalui kebijakan fiskal. Pengeluaran publik menjadi instrumen utama karena digunakan untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Ujianto *et al.*, 2017, p. 74). Menurut Musgrave (1973, p. 6), kebijakan fiskal mencerminkan peran pemerintah dalam mengarahkan perekonomian agar berjalan optimal. Pemerintah menghimpun dana dari berbagai sumber, seperti pajak dan transfer, kemudian mengalokasikannya untuk penyediaan layanan dan pembangunan. Musgrave membagi peran pemerintah ke dalam tiga fungsi utama, yaitu distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Fungsi distribusi berkaitan dengan pemerataan pendapatan dan pembangunan antarwilayah (Musgrave, 1973, p. 13). Berdasarkan konteks desentralisasi fiskal, hal ini tercermin melalui penyaluran dana dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal.

Fungsi alokasi berfokus pada penyediaan barang dan jasa publik yang tidak dapat dipenuhi secara optimal oleh sektor swasta (Musgrave, 1973, p. 25). Fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya menjaga kestabilan perekonomian, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kesempatan kerja (Musgrave, 1973, p. 33). Fungsi alokasi menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan daerah karena berkaitan dengan bagaimana anggaran digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi. Efektivitasnya sangat ditentukan oleh arah penggunaan anggaran. Alokasi yang lebih banyak ditujukan pada kegiatan nonproduktif dapat mengurangi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga bukan hanya besarnya anggaran yang penting, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut dimanfaatkan secara optimal (Ujianto *et al.*, 2017).

Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa organisasi perlu memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan (Freeman, 1984). Organisasi tidak hanya berfokus pada kepentingannya sendiri, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan serta dampak kebijakan terhadap pihak-pihak yang terlibat atau terdampak (Frederick *et al.*, 1992). Dengan demikian, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari pencapaian tujuan internal, tetapi juga dari sejauh mana organisasi mampu memenuhi harapan para *stakeholder*. Konsep ini sejalan dengan pendekatan *New Public Management* yang menekankan efisiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah Osborne & Gaebler (1993).

Pemerintah sebagai organisasi publik dituntut untuk mampu mengelola sumber daya secara efektif sekaligus mempertimbangkan berbagai kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan. Penerapan teori *stakeholder* dalam pemerintahan daerah menekankan bahwa kebijakan yang diambil harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak terkait lainnya. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan secara tepat agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan tersebut mencakup bagaimana pemerintah mengalokasikan pendapatan daerah ke dalam pengeluaran yang memberikan manfaat nyata, seperti pembangunan fasilitas publik dan peningkatan kualitas layanan (Harjito *et al.*, 2020; Verawaty *et al.*, 2020) Melalui pengelolaan yang baik, masyarakat sebagai *stakeholder* utama dapat merasakan dampak langsung dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Data diolah, 2026

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Halim, 2002). Pemberian DAU didasarkan pada prinsip mengurangi kesenjangan fiskal (*fiscal gap*), yaitu mempertimbangkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masing-masing daerah (Mardiasmo, 2014). Pengelolaan DAU yang tepat diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya tercermin dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian oleh Priambodo & Hidayat (2024), Hutasuhut *et al.* (2025), dan

Fikram *et al.* (2025) mengatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

H₁: Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional (Maheni & Maryono, 2021). Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004, DAK berfungsi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. DAK terdiri atas dua jenis, yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK Fisik digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana dengan penggunaan yang telah ditentukan secara spesifik berdasarkan bidang tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (PMK No. 25 Tahun 2024). Pengalokasian DAK yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong aktivitas ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah *et al.* (2022), Lalimbat *et al.* (2025), dan Tampil *et al.* (2022) menyatakan bahwa DAK memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

H₂: Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PMK No. 62 Tahun 2023). Sumber pembiayaan belanja modal berasal dari berbagai komponen pendapatan daerah, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, serta sumber lainnya yang sah (Farhan *et al.*, 2023). Belanja modal memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama melalui penyediaan infrastruktur yang dapat mendorong investasi, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja (Antari & Sedana, 2018). Peningkatan realisasi belanja modal juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas ekonomi melalui pembangunan aset publik (Anggreni & Artini, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Lalimbat *et al.* (2025), Apoda & Rumbia (2025) dan Haryati *et al.* (2025) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

H₃: Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penyaluran DAU bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peningkatan DAU memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengeluaran, khususnya dalam bentuk belanja modal sebagai bagian dari fungsi alokasi guna mendukung penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik. Penelitian yang dilakukan oleh Samto *et al.* (2025) Winarto & Indarti (2024), dan Chandra & Badrudin (2024) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

H₄: Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Peningkatan DAK juga memberikan dukungan pengeluaran yang lebih terarah bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik melalui belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Winarto & Indarti (2024), Leorisa *et al.*, (2025), dan Febriyana & Narastri (2024) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal.

H₅: Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Dana transfer seperti DAU dan DAK yang diterima daerah tidak selalu berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruhnya sangat bergantung pada bagaimana anggaran tersebut digunakan oleh pemerintah daerah. Belanja modal menjadi salah satu bentuk pengeluaran yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan penyediaan aset publik. Pembangunan tersebut dapat meningkatkan konektivitas, memperlancar aktivitas ekonomi, serta mendorong masuknya investasi di daerah. Dampak ini menunjukkan bahwa belanja modal memiliki peran penting dalam memperkuat pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan tambahan kapasitas fiskal bagi pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan. Fleksibilitas penggunaan DAU memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas masing-masing daerah, termasuk pada belanja yang bersifat investasi seperti belanja modal. Pemanfaatan DAU dapat diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik yang mendukung aktivitas ekonomi. Ketika sebagian alokasi DAU digunakan untuk belanja modal, dampaknya dapat terlihat pada peningkatan kapasitas produksi daerah, perbaikan konektivitas, serta meningkatnya daya tarik investasi.

H₆: Belanja modal memediasi pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki karakteristik penggunaan yang lebih spesifik karena telah ditentukan berdasarkan bidang tertentu sesuai prioritas nasional. Penggunaan DAK diarahkan pada sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga secara konseptual memiliki keterkaitan dengan pembentukan aset publik. Namun, komposisi DAK yang terdiri dari DAK fisik dan nonfisik menyebabkan tidak seluruh peningkatan DAK secara langsung berkontribusi pada belanja modal. DAK fisik memang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi DAK nonfisik lebih banyak digunakan untuk mendukung kegiatan operasional layanan publik. Kondisi ini menyebabkan peningkatan DAK tidak selalu diikuti oleh peningkatan belanja modal dalam proporsi yang sama.

H₇: Belanja modal memediasi pengaruh dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi

Hasil penelitian terkait pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Kurniawati & Muzdalifah, 2022; Lestari & Utama, 2019; Maheni & Maryono, 2021; Sukmaadi & Marhaeni, 2021), sementara penelitian lain menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif (Marpaung et al., 2021; Reyhan et al., 2023; Saputera & Pandoyo, 2020). Pada belanja modal, sebagian penelitian menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Astria, 2021; Maury et al., 2023; Yunus & Amirullah, 2019), sementara penelitian lainnya menemukan pengaruh yang negatif (Hutasuhut et al., 2025). Ketidakkonsistenan temuan empiris tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut untuk menganalisis pengaruh

DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi serta menguji peran belanja modal sebagai mediasi dalam hubungan tersebut pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif untuk menganalisis hubungan antar variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, dengan jumlah sampel sebanyak 9 kabupaten/kota. Data yang digunakan berupa data sekunder dalam bentuk data panel, yaitu gabungan data *time series* tahun 2015–2024 dan data *cross section* kabupaten/kota. Data diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Variabel penelitian terdiri atas Pertumbuhan Ekonomi (Y) yang diukur menggunakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Alokasi Umum (X1), dan Dana Alokasi Khusus (X2), serta Belanja Modal (M) sebagai variabel mediasi yang diukur berdasarkan realisasi anggaran dan ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (ln) untuk mengurangi heteroskedastisitas serta menstabilkan varians data.

Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS) untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel. Evaluasi model dilakukan melalui pengujian inner model yang meliputi koefisien jalur (path coefficient), koefisien determinasi (R-square), *effect size* (f^2), dan *predictive relevance* (Q^2). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode *bootstrapping* dengan melihat nilai t-statistic dan p-value untuk menentukan signifikansi hubungan antar variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Antastistik deskriptif memberikan gambaran umum karakteristik data penelitian (Ghozali & Kusumadewi, 2023). Tabel 2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki rentang nilai dari -0,220 hingga 0,237, yang mengindikasikan adanya ekspansi ekonomi selama periode penelitian. Nilai rata-rata sebesar 0,068 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Bali cenderung berada pada tingkat moderat.

Tabel 2.
Uji Statistik Deskriptif

Name	Mean	Median	Min	Max	Standard deviation
PDRB	0.068	0.085	-0.220	0.237	0.067
DAU	6.415	6.439	5.659	6.936	0.282
DAK	5.015	5.205	-0.614	5.951	0.862
BM	5.417	5.355	4.046	7.502	0.645

Sumber: Data diolah, 2026

Dana Alokasi Umum memiliki rata-rata sebesar 6,415 dengan variasi yang relatif rendah, yang mencerminkan distribusi dana yang cukup stabil antar daerah. Dana Alokasi Khusus memiliki rentang nilai yang lebih lebar, yaitu dari -0,614

hingga 5,951, yang mengindikasikan adanya perbedaan alokasi yang signifikan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Belanja modal memiliki rata-rata sebesar 5,417, yang menunjukkan adanya perbedaan prioritas pembangunan antar kabupaten/kota di Bali dalam mengalokasikan pengeluaran untuk investasi jangka panjang. Hasil statistik deskriptif ini menunjukkan adanya variasi pada seluruh variabel penelitian, baik pada DAU, DAK, belanja modal, maupun pertumbuhan ekonomi. Variasi tersebut mengindikasikan bahwa kondisi fiskal dan tingkat pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali tidak seragam, sehingga memungkinkan adanya pengaruh yang berbeda-beda antar wilayah dalam model penelitian ini.

Tabel 3.
Uji R-Square

	<i>R-square adjusted</i>
BM	0.095
PE	0.109

Sumber: Data diolah, 2026

Koefisien determinasi (R-square) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel eksogen dalam menjelaskan variasi variabel endogen dalam model penelitian (Ghozali & Kusumadewi, 2023). Berdasarkan Tabel 3, nilai R-square pada variabel Belanja Modal sebesar 0,095 menunjukkan bahwa DAU dan DAK hanya menjelaskan sebagian kecil variasi belanja modal. Nilai R-square pada variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,109 menunjukkan bahwa kombinasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal memiliki kontribusi yang terbatas dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien determinasi yang relatif rendah pada kedua variabel endogen mengindikasikan bahwa model penelitian tidak dapat menjelaskan hubungan antar variabel secara komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor lain di luar model yang kemungkinan memiliki peran lebih dominan dalam memengaruhi belanja modal maupun pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 4.
Ukuran Efek (*Effect Size*)

	Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi
DAK	0.018	0.054
DAU	0.130	0.025
Belanja Modal		0.125

Sumber: Data diolah, 2026

Ukuran efek (*effect size* / f^2) digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam model penelitian (Ghozali & Kusumadewi, 2023). Berdasarkan Tabel 4, seluruh variabel dalam model menunjukkan nilai effect size yang relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing variabel eksogen belum memberikan kontribusi yang substansial dalam menjelaskan perubahan pada belanja modal maupun pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang terbatas terhadap belanja modal maupun pertumbuhan ekonomi. Belanja modal menunjukkan kontribusi yang relatif kecil dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi. Hasil ini konsisten dengan hasil pengujian koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa model penelitian memiliki keterbatasan dalam menjelaskan hubungan antar variabel secara komprehensif, sehingga kemungkinan terdapat faktor lain di luar model yang lebih berperan dalam memengaruhi variabel endogen.

Relevansi prediktif (Q^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam memprediksi variabel endogen berdasarkan variabel eksogen (Ghozali & Kusumadewi, 2023). Nilai ini menggambarkan apakah model mampu menghasilkan prediksi yang mendekati kondisi sebenarnya di data.

Tabel 5.
Relevansi Prediktif (*Predictive Relevance*)

	<i>Q²predict</i>
BM	-0.062
PE	-0.038

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 5, nilai Q^2 predict pada Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan nilai negatif. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa hasil prediksi model tidak lebih baik dibandingkan dengan menggunakan nilai rata-rata data, sehingga kemampuan model dalam memprediksi kedua variabel tersebut masih rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan pada DAU dan DAK, serta hubungan yang terbentuk dalam model, belum mampu digunakan untuk memperkirakan perubahan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi secara akurat. Q^2 mengindikasikan bahwa model lebih sesuai digunakan untuk tujuan eksplanatori atau menjelaskan hubungan dibandingkan sebagai model prediktif. Kondisi ini dapat disebabkan oleh keterbatasan variabel dalam model yang belum sepenuhnya mampu menangkap faktor-faktor lain yang memengaruhi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, seperti kondisi makroekonomi, kebijakan daerah, maupun faktor eksternal lainnya, sehingga kemampuan prediktif model menjadi terbatas.

Uji hipotesis selanjutnya dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel dalam penelitian ini terbukti secara statistik atau tidak. Pengujian ini didasarkan pada nilai *t-statistics* dan *p-values* untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan.

Tabel 6.
Hasil Pengujian Hipotesis

	<i>Path Coefficient</i>	<i>T statistics</i>	<i>P values</i>
DAU -> PE	0.170	1.017	0.309
DAK -> PE	-0.239	2.684	0.007
BM -> PE	0.349	2.791	0.005
DAU -> BM	-0.371	2.676	0.007
DAK -> BM	0.137	0.824	0.410
DAU -> BM -> PE	-0.129	1.730	0.084
DAK -> BM -> PE	0.048	0.635	0.526

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil *path coefficient* Pada Tabel 6, hubungan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan arah positif, yang berarti peningkatan DAU diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi. DAK terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan arah negatif, yang berarti peningkatan DAK diikuti oleh penurunan pertumbuhan ekonomi. Belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan arah positif, yang berarti peningkatan belanja modal diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada hubungan terhadap belanja modal, DAU menunjukkan arah negatif, yang berarti peningkatan DAU diikuti oleh penurunan belanja modal. DAK terhadap belanja modal menunjukkan arah positif, yang berarti peningkatan DAK belanja modal, DAU menunjukkan arah negatif, yang berarti peningkatan DAU diikuti oleh penurunan pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. *Path coefficient* hanya menggambarkan arah hubungan yang terbentuk.

Berdasarkan Tabel 6, Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Bali, yang dalam perspektif teori keuangan publik (*public finance*) mencerminkan belum optimalnya fungsi alokasi pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang. Karakter DAU sebagai *block grant* meningkatkan kapasitas fiskal sekaligus memberikan diskresi tinggi, namun praktiknya cenderung diarahkan pada belanja operasi dibandingkan belanja modal. Alokasi yang relatif lebih terbatas pada belanja modal menyebabkan efek terhadap peningkatan kapasitas produksi dan ekspansi ekonomi jangka panjang menjadi kurang optimal. Periode pandemi COVID-19 memperkuat kecenderungan tersebut melalui kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran ke sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan penanganan krisis, sehingga memperkuat orientasi pada kebutuhan jangka pendek (Pemerintah Provinsi Bali, 2020). Teori keuangan publik menunjukkan bahwa dominasi fungsi stabilisasi lebih besar dibandingkan fungsi alokasi, sehingga peningkatan kapasitas fiskal dari DAU belum sepenuhnya ditransmisikan menjadi pertumbuhan ekonomi yang terukur secara signifikan. Dalam perspektif teori *stakeholder*, kondisi ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan langsung masyarakat, meskipun berdampak pada terbatasnya dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hasil ini sejalan dengan Maheni & Maryono (2021), Lulage *et al.* (2023), dan Dini *et al.* (2021).

Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Bali, artinya peningkatan DAK menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di Bali. Berdasarkan perspektif teori keuangan publik, fungsi alokasi belum berjalan optimal dalam mendorong peningkatan output daerah. Penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Provinsi Bali tercermin pada Tabel 1 yang menunjukkan bahwa sebagian besar sektor PDRB Bali mengalami penurunan. Penurunan ini terutama terjadi pada sektor pariwisata yang menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Pada kondisi tersebut, kebutuhan daerah seharusnya berfokus pada pemulihan sektor-sektor terdampak. Karakteristik DAK sebagai dana yang bersifat spesifik (*earmarked*) membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran, sehingga alokasi yang diterima tidak selalu sesuai dengan kebutuhan daerah dan tidak dapat secara fleksibel dialihkan untuk mendukung sektor yang mengalami penurunan.

Pelaksanaan program juga menghadapi kendala seperti keterlambatan penyaluran, keterbatasan kapasitas pengelolaan, serta perencanaan yang belum optimal, sehingga realisasi anggaran tidak maksimal dalam satu periode (Rochaendi & Salim, 2020). Kondisi tersebut menyebabkan manfaat ekonomi yang diharapkan tidak tercapai secara penuh, sehingga menimbulkan dampak negatif dalam jangka pendek. Berdasarkan perspektif teori *stakeholder*, keterbatasan fleksibilitas tersebut membuat pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu menyesuaikan penggunaan dana dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, manfaat yang dirasakan belum optimal dalam mendorong aktivitas ekonomi karena efektivitas DAK sangat bergantung pada kesesuaian alokasi dengan kebutuhan riil daerah serta kualitas implementasi program. Ketidaksesuaian dan kendala pelaksanaan menyebabkan fungsi alokasi tidak efektif. Temuan ini didukung oleh Anjelina *et al.* (2019), Arina *et al.* (2019), dan Rahman *et al.* (2022).

Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Bali, yang mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi belanja modal mampu meningkatkan aktivitas ekonomi daerah. Perspektif teori keuangan publik, khususnya fungsi alokasi, menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam mengalokasikan sumber daya untuk menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh sektor swasta. Berdasarkan perspektif teori *stakeholder*, belanja modal menjadi bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung.

Belanja modal mencerminkan instrumen kebijakan fiskal yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi daerah melalui penyediaan infrastruktur produktif. Alokasi yang relatif tepat sasaran menunjukkan bahwa fungsi alokasi telah berjalan efektif dalam mendukung peningkatan output ekonomi.

Berdasarkan Tabel 1 yang menunjukkan bahwa perekonomian kabupaten/kota di Bali sempat mengalami penurunan pada periode pandemi COVID-19. Belanja modal dapat menjadi instrumen untuk memulihkan perekonomian melalui penyediaan infrastruktur yang mampu mendorong kembali aktivitas ekonomi. Pengaruh positif belanja modal ini menunjukkan bahwa alokasi yang dilakukan pemerintah daerah Bali telah efektif dalam mendukung pemulihan ekonomi Bali pada periode penelitian, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil ini sejalan dengan Herman (2025), Simanjuntak *et al.* (2025), dan Haryati *et al.* (2025).

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Bali. Data realisasi APBD menunjukkan bahwa proporsi belanja operasi lebih besar dibandingkan belanja modal, sehingga peningkatan DAU diikuti oleh penurunan proporsi belanja modal dalam struktur anggaran daerah. Kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan perekonomian Bali mengalami penurunan yang tercermin pada turunnya PDRB pada Tabel 1 turut memperkuat pola tersebut melalui kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran ke sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan penanganan krisis, yang meningkatkan kebutuhan belanja operasi dan mengurangi ruang fiskal untuk belanja modal (Pemerintah Provinsi Bali, 2020).

Perspektif teori keuangan publik, khususnya fungsi alokasi, menjelaskan bahwa pemerintah seharusnya mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk

mendukung kesejahteraan dan pembangunan jangka panjang. Peningkatan DAU dalam praktiknya lebih banyak terserap pada belanja operasi, yang tercermin pada struktur APBD kabupaten/kota di Bali. Kondisi ini menunjukkan bahwa komposisi pengeluaran pemerintah daerah memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran. Ketika proporsi belanja lebih terkonsentrasi pada belanja operasi, maka alokasi dana untuk belanja modal menjadi berkurang. Berdasarkan perspektif teori *stakeholder*, kondisi ini mencerminkan prioritas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan langsung masyarakat melalui belanja operasi, meskipun berdampak pada terbatasnya alokasi untuk pembangunan jangka Panjang. Hasil ini sejalan dengan Rukmini *et al.* (2025), Azzahra *et al.* (2025), Samto *et al.* (2025).

Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Bali. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui karakter DAK yang penggunaannya telah ditentukan secara spesifik oleh pemerintah pusat serta komposisinya yang mencakup DAK fisik dan DAK nonfisik dalam porsi yang relatif seimbang. Struktur tersebut menyebabkan peningkatan DAK tidak secara langsung mengubah alokasi belanja modal, karena tambahan dana tetap mengikuti peruntukan yang telah ditetapkan.

Perspektif teori keuangan publik, khususnya fungsi alokasi, menjelaskan bahwa efektivitas pengeluaran pemerintah sangat dipengaruhi oleh kewenangan dalam menentukan penggunaan anggaran. Pada DAK, fungsi alokasi sebagian berada pada pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengarahkan tambahan dana ke belanja modal. Peningkatan DAK tidak diikuti oleh perubahan komposisi belanja daerah, karena alokasi dana telah dikunci sesuai prioritas program yang ditetapkan secara nasional. Kondisi ini menyebabkan perubahan besaran DAK tidak berdampak pada perubahan belanja modal. perspektif teori *stakeholder*, keterbatasan kewenangan tersebut membuat pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maheni & Maryono (2021) dan Purnasari *et al.* (2022)

Belanja modal tidak memediasi pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali. Peningkatan DAU tidak diikuti oleh peningkatan belanja modal yang memadai karena tambahan dana lebih banyak terserap pada belanja operasi, sehingga perubahan DAU tidak menghasilkan perubahan pada belanja modal. Data realisasi APBD memperlihatkan dominasi belanja operasi dalam struktur anggaran daerah, yang menyebabkan proporsi belanja modal relatif terbatas meskipun kapasitas fiskal meningkat. Kondisi pandemi COVID-19 memperkuat pola tersebut melalui *refocusing* anggaran ke sektor kesehatan dan perlindungan sosial, sehingga alokasi dari DAU semakin terkonsentrasi pada pengeluaran non-modal.

Perspektif teori keuangan publik, khususnya fungsi alokasi, menjelaskan bahwa efektivitas transmisi fiskal sangat ditentukan oleh komposisi pengeluaran pemerintah. Ketika peningkatan DAU tidak diikuti oleh peningkatan belanja modal, maka mekanisme penyaluran pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal menjadi tidak berjalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi alokasi belum optimal, karena tambahan kapasitas fiskal tidak dikonversi ke dalam

belanja yang berperan sebagai penghubung antara DAU dan pertumbuhan ekonomi, sehingga belanja modal tidak mampu memediasi hubungan tersebut. Berdasarkan perspektif teori *stakeholder*, kondisi ini mencerminkan bahwa pemenuhan kebutuhan jangka pendek masih menjadi prioritas, sehingga peran belanja modal dalam memberikan manfaat ekonomi jangka panjang menjadi terbatas. Hasil ini sejalan dengan Sundoro & Suhardjo (2021).

Belanja modal tidak memediasi pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali, sehingga jalur tidak langsung melalui belanja modal tidak terbentuk. Peningkatan DAK tidak diikuti oleh peningkatan belanja modal karena struktur dan peruntukan DAK telah ditentukan secara spesifik oleh pemerintah pusat, sehingga tambahan dana tetap mengikuti komposisi yang telah ditetapkan. Data realisasi transfer daerah menunjukkan bahwa alokasi DAK tidak sepenuhnya diarahkan pada pembentukan aset tetap, sehingga perubahan besaran DAK tidak menghasilkan perubahan yang berarti pada belanja modal sebagai variabel perantara.

Perspektif teori keuangan publik, khususnya fungsi alokasi, menjelaskan bahwa efektivitas transmisi fiskal sangat dipengaruhi oleh kewenangan dalam menentukan penggunaan anggaran. Keterbatasan pemerintah daerah dalam mengarahkan DAK menyebabkan fungsi alokasi tidak sepenuhnya berada pada tingkat daerah, sehingga peningkatan DAK tidak dikonversi menjadi belanja modal. Kondisi tersebut menyebabkan belanja modal tidak berperan sebagai mekanisme yang menyalurkan pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan perspektif teori *stakeholder*, keterbatasan kewenangan tersebut membuat pemanfaatan dana belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dampaknya terhadap aktivitas ekonomi menjadi terbatas. Temuan ini sejalan dengan Maheni & Maryono (2021).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dana transfer daerah, baik DAU maupun DAK, tidak mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, bahkan DAK justru menurunkan pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu, DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal, sementara DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal, yang berarti peningkatan dana transfer daerah tidak meningkatkan belanja modal. Selain itu, belanja modal juga tidak memediasi pengaruh DAU maupun DAK terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dana transfer daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa belanja modal merupakan salah satu komponen pengeluaran daerah yang memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi. Pengalokasian anggaran daerah perlu dilakukan secara proporsional dan efektif pada berbagai jenis belanja, dengan tetap

memperhatikan prioritas pada pengeluaran yang bersifat produktif agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Penelitian ini terbatas pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2015–2024 serta hanya menggunakan variabel DAU, DAK, dan belanja modal, sehingga belum sepenuhnya menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti PAD atau pada periode penelitian yang berbeda agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif. Pemerintah pusat perlu meningkatkan fleksibilitas dan ketepatan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah agar lebih efektif dalam mendorong aktivitas ekonomi. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) secara lebih proporsional dengan menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal. Pengelolaan anggaran yang seimbang dan strategis menjadi penting agar setiap alokasi belanja dapat memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan ekonomi daerah.

REFERENSI

- Adur, V. R. G. B. (2024). Analysis of The Influence of Local Original Income, General Allocation Fund and Special Allocation Fund on Economic Growth with Capital Expenditure as an Intervening Variable in Regional Governments throughout Manggarai Raya in 2013-2023. *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, 5(9), 53–66.
- Anggreni, N. K. A., & Artini, L. G. S. (2019). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 8(3), 1315–1345.
- Anjelina, P., Zamzami, & Nurhayani. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. *Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 7(2), 113–122.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(2), 1080–1110.
- Apriyanti, M. E., & Hatmoko, B. D. (2024). Peran Pariwisata terhadap PDRB dan Dampaknya terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali. *Sosio E-Kons*, 16(2), 135–146.
- Astria, A. (2021). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 42–54.
- Azzahra, H., Fauzi, A., & Utaminingtyas, T. H. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal yang Dimoderasikan dengan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(9), 3425–3446.
- Candraningrat, I. R., Dewi, V. I., & Dewi, P. A. K. (2025). Impact of Fintech on Financial Performance of MSMEs in Bali with Financial Literacy as

- Moderator. *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 19(1), 1–8.
- Dini, S., Tarigan, E. A. Br., & Siregar, M. N. A. (2021). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4, 66–0.
- Djuniardi, D., Fitriani, L. K., & Kartika, N. E. (2026). *Cooperative and Financial Literacy on Cooperative Performance: The Mediating Role of Business Capability*. 20(1), 54–72.
- Farhan, M. G., Sari, K. R., & Mubarak, M. H. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(6), 2358–2370.
- Febriyana, N., & Narastri, M. (2024). The Influence of Local Original Revenue (PAD), Balanced Funds, Budget Surplus (SILPA), and Special Allocation Funds (DAK) on Capital Expenditure (Case Study on Regency/City Governments in East Java 2017-2023). *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, 2(1), 267–283.
- Frederick, W. C., Davis, K., & Post, J. E. (1992). *Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*. McGraw-Hill.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
- Ghozali, I., & Kusumadewi, K. A. (2023). *Partial Least Squares - SmartPLS 4.0*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Harjito, Y., Nugraha, G. P. S., & Yulianto. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia. *JAE: Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 5(1), 19–28.
- Haryati, D. C., Nurpiji, Masitoh, G., Saputra, W., & Subarkah, T. (2025). Analisis Efisiensi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia: Pendekatan Data Panel. *Gemilang: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(3), 139–153.
- Herman, V. V. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Investasi, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *Global Research and Innovation Journal*, 1(2), 2287–2294.
- Hutasuhut, N., Yahya, I., & Erwin, K. (2025). Analysis of the Effect of Local Own-Source Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, And Village Funds on Economic Growth with Capital Expenditure as a Moderating Variable in Regency/City of Sumatera. *International Journal of Research and Review*, 12(9), 621–637.
- Indrawati, S. M., Satriawan, E., & Abdurrohman. (2024). Indonesia's Fiscal Policy in the Aftermath of the Pandemic. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 60(1), 1–33.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Jakarta: Kementerian Keuangan.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kurniawati, & Muzdalifah. (2022). Pengaruh PAD dan DAU Melalui Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Periode 2011-2018). *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1), 16–28.
- Kusumawati, L., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(5), 2592–2620.
- Lestari, S., & Utama, M. S. (2019). The Effect of Local Government Own Revenue and Revenue Sharing Funds on Economic Performance and Community Welfare Through Capital Expenditure of Regency/City in Bali Province, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 91(7), 67–87.
- Lisandri, Rizani, F., & Syam, A. Y. (2020). Pengaruh PAD dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Keuangan*, 7(2), 112–122.
- Lulage, J., N, E., Walewangko, & Krest D. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2010–2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(6), 230–240.
- Maheni, M., & Maryono. (2021). Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Proceeding SENDIU*, 60–70.
- Mardiasmo. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Marliana, R., Prasetyo, A. S., & Yulianto, P. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Modal di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia STIE Wiya Wiwaha*, 2(2), 620–640.
- Marpaung, K., Takari, D., & Ompusunggu, C. D. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Journal Magister Ilmu Ekonomi Universtas Palangka Raya*, 7(2), 127–134.
- Maury, G. A., Kumenaung, A. G., & Naukoko, A. T. (2023). Pengaruh Belanja Modal dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(4), 109–120.
- Musgrave, R. A. (1973). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1993). *Reinventing Government: The Five Strategies for Reinventing Government*. Penguin Publishing Group.
- Pemerintah Provinsi Bali. (2020). *Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020*.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (2022).
- Priambodo, A. P., & Hidayat, N. W. (2024). Pengaruh PAD, DAU, DBH, dan Belanja Modal terhadap PDRB dan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 8(1), 2581–1207.
- Priyono, I. A., & Khotimah, H. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota Jawa Timur Tahun 2019-2021. *Journal Trilogi Accounting and Business Research*, 2(2), 235–245.
- Purnasari, N., Sitompul, E., & Laowo, D. K. (2022). Pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2019. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1412–1425.
- Rahman, A. G., Dai, S. I. S., & Santoso, I. R. (2022). Pengaruh Dana Transfer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Wilayah Sulawesi). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 22, 64–74.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Reyhan, M. A., Dwi, A., & Bawono, B. (2023). The Effect of General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Regional Original Income on Economic Growth with Capital Expenditure as a Moderation Variable. *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science*, 6(4), 501–509.
- Rochaendi, E., & Salim, A. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pendidikan Islam*, (1), 29–44.
- Rukmini, M., Riningsih, D., Nuansari, S. D., Yunanto, F., & So, M. (2025). Evaluating the Effectiveness of Special and General Allocation Funds on Capital Spending in Indonesia Regional Economies. *International Journal of Economics Development Research*, 6(1), 395–409.
- Samto, Maftuhannisak, Yani, & Jamil, M. S. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kota/Kab Provinsi Jawa Tengah (Periode 2021-2023). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 431–445.
- Saputera, A. G. E., & Pandoyo. (2020). Pengaruh DAU, PAD, DAK Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekbank*, 3(2), 17–28.
- Simanjuntak, G. Y., Yulika, M., Putri, D. N., & Pangestoeti, W. (2025). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 260–273.
- Simbolon, Y. C., Maksum, A., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu periode 2012-2018. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 826–839.

- Sinaga, M., Zalukhu, R. S., Collyn, D., & Hatauruk, R. P. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kepulauan Nias: Mediasi Belanja Modal. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 1070–1081.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukmaadi, D. P. S., & Marhaeni, A. A. I. N. (2021). Economic growth and inequality of income distribution between regions: Evidence from Bali Province, Indonesia. *Journal of Socioeconomics and Development*, 4(1), 69–80.
- Sundoro, F. M., & Suhardjo, Y. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 19(3), 141–152.
- Ujianto, H., Moehaditoyo, S. H., & Amin, H. M. (2017). *Keuangan Negara*. Indomedia Pustaka. www.indomediapustaka.com
- Verawaty, Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Journal Management, Business, and Accounting*, 19(1), 21–37.
- Winarto, J. S., & Indarti, M. G. K. (2024). Capital Expenditure: Antecedents and Its Impact on Economic Growth. *International Journal of Economics Development Research*, 5(1), 191–209.
- Yunus, S., & Amirullah. (2019). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Aceh). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2), 186–189.
- Yuwono, V. K., Leoparjo, F., Irtanto, D., Nugraha, K. A., & Wibowo, O. H. (2024). Diversifikasi Ekonomi di Pulau Bali dalam Perspektif Pariwisata. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(3), 1128–1144.